

## Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Patriarkal: Dinamika Sosio-Kultural Pemimpin Perempuan di Aceh Besar

Rakhmawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Washliyah, Aceh, Indonesia

\*Corresponding Author: [Rachmashaliba@gmail.com](mailto:Rachmashaliba@gmail.com)

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
25 February 2024	15 July 2024	10 December 2024	31 January 2025

### Abstract

This study aims to analyze the factors that contribute to the emergence of female leaders in Aceh Besar, a region known for its strong adherence to patriarchal values. Despite the socio-cultural constraints, five women have attained strategic and sacred leadership positions, challenging traditional gender norms. Employing a qualitative approach, this research utilizes a phenomenological method to explore the lived experiences of these female leaders within the socio-cultural dynamics of Aceh Besar. Data were collected through in-depth interviews and observations, allowing for a comprehensive understanding of the underlying factors that support their leadership roles. The findings reveal that the rise of female leaders in Aceh Besar is driven by a combination of intellectual capacity, social capital, and active participation in public affairs. Their leadership roles signify a shift in societal perceptions, demonstrating that women are increasingly recognized as capable and influential figures in various sectors. Furthermore, their success highlights the evolving nature of gender roles in Aceh Besar, where women are gradually gaining equal opportunities alongside men. Theoretically, this study contributes to the discourse on gender and leadership in patriarchal societies, particularly in Islamic contexts. It underscores the significance of social capital and intellectual empowerment in enabling women to break traditional barriers and reshape societal norms.

**Keywords:** Aceh Besar, Patriarchal Culture, Women Leaders.

**How to cite:** Rakhmawati. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Patriarkal: Dinamika Sosio-Kultural Pemimpin Perempuan di Aceh Besar. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 34(1), 27–48. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v34i1.2093>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Memasuki abad ke 21 budaya patriarki dan stigmanisasi terhadap perempuan sudah mulai memudar dan bergeser ke pemberdayaan perempuan.<sup>1</sup> Kaum perempuan sudah menunjukkan kemampuan dan profesionalismenya dalam menjalankan peran sebagai pejabat publik, pemangku kebijakan, seperti pimpinan, menteri, dirjen, parlemen, legislatif, eksekutif, yudikatif, BUMN maupun profesionalisme di lembaga non pemerintahan lainnya.<sup>2</sup> Suguhan fakta perkembangan peran perempuan dari ranah domestik ke wilayah publik sudah seharusnya terjadi, agar tidak ada lagi anggapan dikotomi yang membelah kedudukan pria dan wanita dalam kehidupan realistik.<sup>3</sup>

Di era modern, kaum perempuan sudah menunjukkan keaktifannya diruang publik. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga munculnya perubahan-perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti lahirnya *knowledge society* berupa dominasi otoritas ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia dan munculnya *global village* yang semakin memperkecil makna perbedaan jarak, ruang dan waktu. Kebangkitan ataupun *nabdhah* ini menimbulkan tuntutan yang melahirkan demokrasi, hak asasi manusia dan emansipasi perempuan.<sup>4</sup> Di era globalisasi, wilayah publik secara dominan sudah di isi oleh kaum perempuan, zona yang pada umumnya didominasi laki-laki kita menemukan keterlibatan perempuan, perlahan-lahan arogansi budaya patriarki mulai terkikis. Diantara penyebabnya adalah keterbukaan informasi digitalisasi sehingga

---

<sup>1</sup> Irma Riyani, *Islam, Women's Sexuality and Patriarchy in Indonesia: Silent Desire* (London: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9781003042723>; Sudarso Sudarso, Phillipus Edy Keban, and Siti Mas'udah, "Gender, Religion and Patriarchy: The Educational Discrimination of Coastal Madurese Women, East Java," *Journal of International Women's Studies* 20, no. 9 (December 20, 2019): 2–12.

<sup>2</sup> Yasnur Asri and Ermawati Arief, "Contesting the Patriarchal Authority: Portrait of Millennial Women in the Indonesian Novel" (The 3rd International Conference on Language, Literature, and Education (ICLLE 2020), Atlantis Press, 2020), 191–202, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201109.032>; Muhammad Zawil Kiram, "Gender and Family in Modern Acehese Society," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 14, no. 1 (June 30, 2020): 126–46, <https://doi.org/10.24815/jsu.v14i1.16794>; Tri Winda Oktavia, Firyal Iftikhar Cikalkinanty, and Agus Fakhruddin, "Patriarchy Culture in Gender Equality Concept: Islamic Perspective," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 5, no. 1 (February 23, 2022): 81–93, <https://doi.org/10.31538/almada.v5i1.2010>.

<sup>3</sup> Heriyanto Heriyanto, "Patriarchal Culture, Theology and State Hegemony in Issues of Gender Equality in Indonesian Politics" (International Conference Social - Humanities in Maritime and Border Area (SHIMBA 2023), Atlantis Press, 2023), 11–15, [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0\\_3](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0_3).

<sup>4</sup>Teori modernisasi ini lahir sekitar tahun 1950 sebagai bentuk tanggapan dari kaum intelektualitas terhadap perang dunia. Menurut Huntington proses modernisasi bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern, kompleks melalui banyak cara), sistematis, global (akan mempengaruhi semua manusia), bertahap (melalui langkah-langkah), hegemoni (convergency) dan progresif. Lihat: David c McClelland, *The Achieving Society*, (New York: D.Van Nostrad, 1961)

pertahanannya melemah seakan wabah bangkitnya perempuan ini tidak terbendung lagi.<sup>5</sup>

Fenomena kekinian terkait keberadaan pimpinan perempuan di beberapa pos institusi pemerintahan maupun lembaga pendidikan Islam yang bernaung di wilayah Aceh Besar. Jabatan kepemimpinan tersebut adalah kepala desa (*Geuchik*), pimpinan pesantren (*dayah*), pimpinan tarekat (*sulok*) baik pemerintahan maupun swasta. Implikasi dari perkembangan zaman inilah yang mengantarkan munculnya para pemimpin perempuan di wilayah Aceh Besar dan sekaligus menjadi headline penelitian ini.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, munculnya para *geuchik* perempuan dan pimpinan pesantren perempuan tersebut, secara general saat pemilihan, kriteria gender tidak dijadikan lagi sebagai syarat kontestasi sehingga terbukanya peluang bagi kaum perempuan untuk menjadi bagian dari pemimpin tersebut.

Kelima pemimpin tersebut terdiri dari tiga kepala desa, *geuchik* desa Seunebok kecamatan Seulimeum bernama Cut Zaitun Akmal, *geuchik* desa Mieruk Taman kecamatan Darussalam bernama Ulyani, ketiga *geuchik* desa Panca Kubu kecamatan Lembah Seulawah bernama Mayasari. Kemudian dari pesantren tepatnya tahun 2021 ditetapkannya Ummi Mukramati sebagai pimpinan pesantren Dayah Istiqamatuddin Darussalam *gampoeng* Mata Ie kecamatan Montasik dan yang terakhir pimpinan tarekat perempuan yang berada di pesantren dayah Thaliban desa Ateuk Lueng Ie kecamatan Ingin Jaya bernama Ummi Lailan Binti Haji. Munculnya perempuan yang diangkat sebagai pemimpin adalah fenomena baru juga isu menarik dan hangat menjadi perhatian, perbincangan masyarakat di wilayah tersebut.<sup>7</sup>

Keberadaan pimpinan wanita dalam konteks kepemimpinan *gampong* (desa) maupun *dayah* (pesantren) merupakan fenomena baru yang menunjukkan perempuan bukanlah makhluk domestik yang hanya berperan dirumah saja tapi juga mampu

---

<sup>5</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2002), 64.

<sup>6</sup> Asna Husin, "Leadership and Authority: Women Leading Dayah in Aceh," in *Gender and Power in Indonesian Islam* (Routledge, 2013); Munawiah Munawiah and Ernita Dewi, "Existency of Women Leadership at Village Level and Its Orientation against Gender Justice (Case Studies in Banda Aceh and Aceh Besar)," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 2 (May 5, 2021): 2298–2305, <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1926>.

<sup>7</sup> "Pilkada 2024: Perempuan dibidang 'haram' jadi pemimpin Aceh, syariat atau politik praktis?," BBC News Indonesia, November 15, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ml75j109jo>; Hilmianti Hilmianti, Ernita Dewi, and Zuherni Zuherni, "Persepsi Masyarakat atas Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (June 30, 2022): 117–35, <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13140>.

berperan diranah publik, pembuktian mereka sebagai pemimpin telah membantah stigma persubordinasian perempuan selama ini.<sup>8</sup> Fenomena ini menjadi catatan sejarah baru di wilayah ini, dikarenakan Aceh Besar dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi budaya patriarki, namun pada kasus ini mampu bergeser menjadi wilayah yang menghargai nilai-nilai egaliter dengan menunjukkan dan memberikan ruang publik untuk diisi oleh kaum perempuan. Walaupun perdebatan demi perdebatan tetap saja terjadi, karena pemikiran demokrasi jabatan publik perempuan masih tersandera dengan hambatan struktural, baik sisi kekodratan perempuan, kapabilitas hingga isu teologis yang melarang wanita sebagai pemimpin. Namun demikian perdebatan itu boleh saja tetap berlangsung, kenyataannya kepemimpinan perempuan terus bertahan ditengah pro kontra, khususnya bagi kelompok yang menolak kepemimpinan perempuan.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu terkait kepemimpinan perempuan dalam masyarakat patriarkal, khususnya di Aceh Besar, menghadapi berbagai tantangan yang berakar pada norma sosial, budaya, dan hukum yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Studi oleh Karistie et al. (2025)<sup>10</sup> menyoroti bahwa perempuan di Indonesia, termasuk di Aceh Besar, berperan dalam manajemen risiko bencana, tetapi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan sering dibatasi oleh sistem patriarki dalam keluarga dan komunitas. Alfitri (2020)<sup>11</sup> juga mengungkap bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia berupaya melindungi perempuan dari ketidakadilan, namun masih ada norma sosial yang mempersempit ruang kepemimpinan Perempuan.

Dalam konteks konservasi dan keadilan lingkungan, Kormos (2024)<sup>12</sup> menyoroti bahwa perempuan di Aceh Besar memainkan peran penting dalam menjaga

---

<sup>8</sup>Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*, (Bandung: Afkaruna, 2021) 50.

<sup>9</sup> Wahidul Anam and Mubaidi Sulaeman, "Reinterpretasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al-Shariah," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (December 28, 2022), <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172>.

<sup>10</sup> Janine Febe Karistie et al., "Women Participation in Disaster Risk Management Practices in Indonesia: A Systematic Review," in *Inclusive and Integrated Disaster Risk Reduction*, ed. Aaron Opdyke and Liberty Pascua de Rivera (Cham: Springer Nature Switzerland, 2025), 207–33, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-81072-5\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-031-81072-5_15).

<sup>11</sup> Alfitri Alfitri, "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia," *Studia Islamika* 27, no. 2 (August 3, 2020): 273–307, <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.

<sup>12</sup> Rebecca Kormos, *Intertwined: Women, Nature, and Climate Justice*, 1st ed (La Vergne: New Press, The, 2024).

keberlanjutan lingkungan, tetapi kontribusi mereka jarang diakui secara formal dalam struktur kepemimpinan. Penelitian Joseph Chinyong Liow (2011)<sup>13</sup> juga menyoroti bagaimana perempuan dalam gerakan politik Islam harus menavigasi norma patriarki untuk mendapatkan posisi kepemimpinan. Secara keseluruhan, meskipun perempuan di Aceh Besar memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan, tantangan sosio-kultural masih menjadi hambatan utama dalam mengukuhkan peran mereka di berbagai sektor. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas akses perempuan terhadap kepemimpinan, baik melalui kebijakan hukum, gerakan sosial, maupun partisipasi aktif dalam berbagai bidang pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan satu gambaran budaya patriarki di kabupaten Aceh Besar, namun keberadaan budaya ini mulai terkikis dengan munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di kabupaten tersebut. Sehingga dengan munculnya *geuchik* perempuan dan pimpinan pesantren perempuan, menandakan bahwa kedudukan perempuan di Aceh Besar sudah setara dengan laki-laki dan muncullah nilai-nilai egaliter. Dalam observasi sebelumnya budaya patriarki masih eksis melarang perempuan menjadi pemimpin, bahkan kehadiran publik perempuan sering tidak diperhitungkan.

## METODE

Metode yang akan digunakan dalam bentuk deskriptif analisis dan pendekatan penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, tehnik pengumpulan data dan terakhir tehnik analisis data. Rencana pembahasan berupaya menyuguhkan jawaban-jawaban realitas sosial yang ditampilkan berikut metodologi sebagai panduan selama penelitian ini dilakukan.<sup>14</sup> Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif, sebagai bentuk kajian yang difokuskan pada ilmu sosiologi sangat bergantung pada hasil observasi ditengah kehidupan masyarakat ditempat penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung untuk melihat fenomena yang berlangsung dilapangan supaya penafsiran yang diperoleh dipastikan

---

<sup>13</sup> Joseph Chinyong Liow, "Islamist Ambitions, Political Change, and the Price of Power: Recent Success and Challenges for the Pan-Malaysian Islamic Party, PAS," *Journal of Islamic Studies* 22, no. 3 (September 1, 2011): 374–403, <https://doi.org/10.1093/jis/etr030>.

<sup>14</sup> John W. Creswell et al., "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation," *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 1, 2007): 236–64, <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.

terukur dan akurat. Sebagaimana disebutkan oleh moleong<sup>15</sup> bahwa tradisi penelitian kualitatif ini berlangsung disaat peneliti mengamati secara fundamental dan baik keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat dikawasan tersebut.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan di lima tempat, pertama di tiga desa tempat pimpinan *gampoeng* (kepala desa) perempuan bekerja, yaitu desa Seunebok kecamatan Seulimeum, desa Mieruk Taman kecamatan Darussalam dan desa Panca Kubu kecamatan Lembah Seulawah, kemudian Pesantren Istiqamatuddin Darussalam desa Matai Ie kecamatan Montasik dan Pesantren Lueng Ie desa Ateuk Lueng Ie kecamatan Ingin Jaya. Informan yang dijadikan sebagai subjek peneliti adalah mereka yang memiliki hubungan kedekatan baik secara struktural maupun emosional juga keturunannya dilingkungan lokasi penelitian yaitu terdiri dari tokoh masyarakat, santri dan orang-orang yang punya kepentingan khusus dengan objek penelitian.

Adapun tehnik pengumpulan data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang akan menjadi acuan adalah mereka-mereka yang berada dilokasi penelitian juga sebagai objek penelitian, karena observasi dan wawancara yang dilakukan melalui tehnik *random sampling*. Ramuan sumber datanya dilakukan dengan wawancara dengan sumber informan ditentukan secara acak di tempat observasi yang sudah di agendakan sebagai lokasi penelitian<sup>16</sup>, dengan cara menghadirkan dokumen-dokumen sebagai bukti akurasi keberlangsungan pemimpinan-pemimpin perempuan ini.<sup>17</sup> Hasil observasi dan wawancara dijadikan sebagai sumber data, selanjutnya dianalisis untuk melihat faktor-faktor yang mengantarkan mereka sebagai pimpinan di tempat institusi masing-masing. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan setelah melalui tahapan olahan data primer, dengan menganalisis literatur-literatur dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan erat dengan kesimpulan dari fakta-fakta sumber primer yang berhasil dikumpulkan di lapangan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006) 4.

<sup>16</sup> Ade Sanjaya, *Model-Model Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 49.

<sup>17</sup> Creswell et al., "Qualitative Research Designs."

<sup>18</sup> Robert G. Burgess, *Field Research: A Sourcebook and Field Manual* (Routledge, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kondisi Geografis, Sosio Historis Kabupaten Aceh Besar*

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 kabupaten di provinsi Aceh, terdiri dari 23 kecamatan dan salah satu dari kecamatannya terdiri dari satu pulau yang dikenal dengan *Pulo Aceh*. Jumlah *gampoeng* atau desa di kabupaten ini berjumlah 604 *gampoeng* (desa). Status desa adalah *definitive*, yang disebut dengan *gampoeng* (desa)<sup>19</sup> dan jumlah aparatur desa tiap-tiap *gampoeng* dikepalai oleh seorang *geuchik*<sup>20</sup>, satu orang sekretaris desa, sedangkan kepala dusun terdapat 3 atau 4 orang, tergantung jumlah dusun yang ada disetiap desa tersebut. Setiap desa mempunyai satu *meunasah* yang sebagiannya juga merangkap sebagai pusat administrasi masing-masing desa.<sup>21</sup>

Penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten Aceh Besar, letaknya berdampingan dengan kota madya Banda Aceh ibu kota provinsi Aceh. Secara geografis, teritorial wilayah kabupaten Aceh Besar mengelilingi Banda Aceh, dengan kata lain ibu kota provinsi Aceh yaitu kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan wilayah Aceh Besar. Demikian kalau dilihat secara letak kewilayahan.<sup>22</sup>

Secara geneologi, wilayah Aceh Besar dahulunya dari masa kerajaan Aceh Darussalam terhitung mulai tahun 1496-1903 masehi terletak di wilayah Aceh Besar. Dahulu wilayah ini disebut dengan Kuta Raja dan sekarang dipecahkan menjadi dua daerah yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. Aceh dalam kesejarahannya dari dulu sudah memberikan porsi khusus bagi perempuan untuk memimpin dan membuka ruang selebar lebarnya bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, bahkan memegang jabatan tertinggi. selama mereka memiliki kesanggupan dan mempunyai pengetahuan

---

<sup>19</sup>*Gampoeng* adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Aceh. *Gampeong* berada di bawah *Mukim*. *Gampoeng* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan dan adat istiadat setempat.

<sup>20</sup>*Geuchik* adalah kepala *gampoeng*. Jabatan ini bersifat periodesasi. *Geusyk* berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keamana dan adat istiadat dalam desanya, yaitu berusaha untuk memakmurkan *gampoengnya* dan memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan. Lihat, Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007) 241

<sup>21</sup>Sebelumnya provinsi Aceh bernama Daerah Istimewa Aceh kemudian berubah menjadi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan terakhir nmenjadi provinsi Aceh. Perubahan nama terakhir ini disesuaikan dengan Undang-Undang No. I, tentang pemerintahan Aceh tahun 2006. Lebih luas lagi mengenai hal ini dijelaskan dalam buku karangan Rusdi Sufi, dkk, *Aceh Besar, Sejarah, Adat dan Budaya*, (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2019).

<sup>22</sup> [www. Acehbesarkab.co.id](http://www.Acehbesarkab.co.id)

untuk bidang-bidang jabatan yang akan dipegangnya. Hal ini mengacu pada sebuah kitab yang bernama "*Safinatul Hukkam*" ditegaskan bahwa wanita boleh menjadi Raja atau Sulthan, dengan syarat memiliki kecakapan dan ilmu pengetahuan.<sup>23</sup>

Kemajuan zaman, terbukanya lapangan dan peluang kerja yang tidak lagi ketat dengan kriteria jender yang melatar belakangi hadirnya perempuan diranah publik seperti akses mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, terlibat aktif di bidang ekonomi dan aktif diranah sosial, kemudian revisi undang undang pro terhadap perempuan, yang demikian ini mengantarkan mereka menjadi perempuan yang memiliki power, kapabilitas, kecakapan, ketrampilan serta kemahiran dan profesionalitasnya dalam menjalankan peran di ranah publik. Semakin kesini para perempuan terus berlomba-lomba dengan menunjukkan kepiawan dan prestasi yang berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai orang yang layak berperan diranah publik.<sup>24</sup>

Maka perubahan sosial yang sangat mendominasi keseharian masyarakat di era globalisasi menunjukkan manusia itu sendiri sedang menyesuaikan kehidupannya dengan segala perubahan yang di hadapi. Ruang ekspresi terbuka lebar bagi perempuan untuk berinteraksi dengan membangun koneksi dan networking yang menghubungkannya dengan dunia laki-laki. Transformasi kehidupan sosial perempuan yang hidup di era modern mesti beriringan dengan pembaharuan regulasi. aturan ini merupakan keharusan yang tidak boleh di abaikan, mengingat transformasi di alami perempuan begitu cepat dan mudah merambah dunia publik dengan menunjukkan kapabilitas dalam berinovasi sehingga mengantarkannya sebagai pengisi ruang publik. sehingga tuntutan tersebut harus tercover dalam ketentuan hukum agar keberlangsungan kehidupan perempuan berlangsung dengan damai dan aman. Keterlibatan perempuan diranah publik pada era globalisasi ini sudah tidak terbandung lagi, ruang publik sudah menjadi bagian yang dihuni oleh mayoritas perempuan.

Secara budaya aktifitas masyarakat Aceh Besar dalam menghidupkan tradisinya

---

<sup>23</sup> Syekh Jalaluddin , *Safinatul Hukkam*..., 27.

<sup>24</sup>Kedudukan perempuan mengalami perubahan dalam tatanan sosial sebagaimana realitas kehidupan perempuan modern yang sudah mengisi ruang publik di berbagai lini kehidupan sehingga terjadi pergeseran, mulanya perempuan fokus dengan urusan-urusan domestik, kemudian seiring pertumbuhan demografi dan mobilisasi penduduk juga revolusi industri perkembangan teknologi secara besar besaran telah menggeser posisi perempuan yang sebelumnya terbatas urusan reproduksi seperti menjaga rumah, mengasuh anak kemudian beralih ke sektor publik (public sphere) dengan bekerja di luar rumah. Semakin kesini data-data menunjukkan semakin pesat para perempuan menduduki wilayah publik bahkan menduduki peran tertinggi di berbagai instansi baik pemerintahan ataupun swasta.



diisi dengan berbagai kegiatan ritual seperti tradisi peusujuk, kenduri kematian (*kbanduri ureung mate*), kenduri sawah (*kbanduri blang*), kenduri memperingati kelahiran Rasulullah Sw (*kbanduri mouled*), tahlilan bagi orang meninggal (*samadiab*), *dalail khairat* (*meuliuke*) dan lain-lainnya. Tradisi-tradisi yang terus dilestarikan ini bisa disebut sebagai bentuk desentralisasi budaya yang ada di daerah Aceh Besar. Tradisi-tradisi budaya dan ritual di dapatkan dari warisan nenek moyang dahulu sampai kini masih terus dipertahankan. Partisipasi masyarakat Aceh Besar dalam mengadakan kegiatan berbagai tradisi yang ada sangatlah antusias, hal ini menjadikan budaya dan adat istiadat tersebut masih lestari. Dalam anggapan masyarakat Aceh Besar, mereka meyakini setiap adat istiadat yang dijalankan tersebut mengandung nilai ibadah yang bertujuan memperoleh keberkahan dari Allah Swt.

Kelestarian budaya dan adat istiadat di Aceh Besar di pengaruhi oleh letak geografis dan keadaan sosiologis daerah tersebut. mengingat posisi kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang berada dalam provinsi (*Aceh poper*) dan telah menyebarkan sebagian penduduknya ke daerah lain sekitarnya (daerah takluk) yang oleh Belanda dinamakan *onderhorigheden*. Semasa masih kerajaan, Aceh Rayeuk merupakan inti kerajaan Aceh yang menyimpan banyak sejarah budaya masa lalu sehingga hal inilah yang mengindikasikan partisipasi masyarakat dalam aksi *cultural* tersebut.<sup>25</sup>

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan ikut serta dalam menentukan kesuksesan bagi masyarakat Aceh Besar. Hal ini terlihat dengan pemamfaatan fasilitas Pendidikan secara baik dan maksimal oleh mayoritas anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah ke atas. Sangat sedikit warga masyarakat yang tidak memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan tersebut, itupun terjadi dijenjang kuliah karena terbatasnya dana yang dimiliki untuk mengantarkan anak-anaknya. Berhentinya pendidikan ini biasanya pada jenjang perguruan tinggi karena keterbatasan finansial.

Sebagian orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke perguruan tinggi bukan berarti tidak dapat memperoleh pendidikan sama sekali, salah satu sarana pendidikan pra sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak mereka adalah pendidikan dayah. Pendidikan dayah di Aceh merupakan suatu lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berkepribadian

---

<sup>25</sup> Agus Budi Wibowo, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh Besar*, (Badan Perpustakaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2006), 11.

Islami, agar menjadi umat yang berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Diharapkan dari dayah lahir manusia yang menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Bila ditinjau dari sudut *historis cultural*, dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi pusat budaya Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat Aceh.<sup>26</sup>

### ***Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Aceh Besar***

Selanjutnya peneliti akan menguraikan kondisi sosial budaya masyarakat Aceh Besar dengan melihat dinamika partisipasi keberadaan kepemimpinan publik perempuan di wilayah Aceh besar baik sebagai pemimpin ditingkat *gampoeng* (desa), pemimpin ditingkat *dayah* (pesantren) dan pemimpin ditingkat tarekat. Diantara persoalan yang hangat diperbincangkan adalah kemampuan perempuan dalam menjalankan tanggungjawab jabatan dan diikuti pandangan keagamaan dalam internal hukum Islam. mayoritasnya melarang perempuan sebagai pemimpin publik terlebih diranah sakral pimpinan *gampoeng* dan pesantren. Gelombang pro kontra ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, pertama faktor budaya patriarki yang masih menganggap perempuan sebagai makhluk kelas dua (*inferior*) dengan asumsi penempatannya cukup diruang domestik. Kemudian ajaran fiqh yang diajarkan di berbagai balai pengajian masih menggunakan kurikulum klasik sebagai pedoman ajaran berupa kitab-kitab yang mendiskriminasikan perempuan, diantaranya kitab *'uqudul lujjain fi bayani huquqi az-zujain*.

Di tengah kondisi kuatnya budaya patriarki memang tidak mudah bagi perempuan untuk menduduki jabatan *geuchik* dalam sebuah *gampung* di Aceh, karena kultur patriarki masih kental dalam masyarakat. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh *geuchik* perempuan cukup berat, semisal masih banyak tantangan dari berbagai unsur baik tokoh agama, tokoh adat ataupun LSM yang tidak membenarkan perempuan menjabat. Hal ini dikarenakan budaya patriarki melarang perempuan menjadi pemimpin yang memiliki dua landasan, agama dijadikan sebagai doktrin teologis dan budaya sebagai doktrin sosial, sehingga implikasi dari budaya patriarki ini secara keseluruhan alasan pelarangannya mengacu pada persoalan klasik yaitu agama tidak membenarkan seorang perempuan

---

<sup>26</sup> Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Jakarta: Nadia Fondation, 2013) 58.

memimpin dengan menyodorkan al Quran surat an Nisa ayat 34 dan Hadis dari Abi bakrah dengan bunyi hadis “tidak beruntungnya suatu kaum yang di pimpin oleh seorang perempuan”.

Sehingga budaya patriarki masih tetap tersisa di kabupaten Aceh Besar, yang membuat sebagian perempuan saat ini masih terkekang dan belum merasakan kebebasan dan haknya secara penuh, khususnya di daerah pesisir. Dalam observasi, sejauh ini budaya patriarki membuka gerbang keleluasaan bagi laki-laki untuk berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Posisi perempuan dalam budaya patriarki sering tidak diperhitungkan, keberadaan kaum perempuan kerap dijadikan sebagai pelengkap dan pemanis, mereka hanya sebagai alat bantu dalam urusan-urusan kecil, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan pun seringkali diabaikan.

Padahal tercatat dalam memori sejarah masyarakat Aceh Besar yang tidak bisa dipisahkan dengan empat kepemimpinan ratu di daerah mereka. Masyarakat disini memiliki sejarah bertahtanya empat Sultan perempuan di Aceh tepatnya di Wilayah Aceh Besar pada abad pertengahan yaitu abad ke tujuh belas masehi, hingga empat orang berturut-turut selama kurang lebih enam puluh tahun yaitu sultanah Safiatuddin, Naqiatuddin, Zakiatuddin dan Kamalat Syah.<sup>27</sup> Kemudian dipenghujung abad pertengahan juga tercatat kepemimpinan berikutnya, seperti Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia sebagai panglima yang memimpin langsung perang belanda yang di dukung oleh alim ulama dan masyarakat setempat. Jiwa semangat berperang ini juga diwarisi dari pahlawan nasional Laksamana Malahayati yang juga tercatat dalam sejarah berasal dari Aceh Besar.<sup>28</sup>

Dalam mengungkapkan bagaimana proses dan faktor munculnya para pimpinan-pimpinan perempuan di Aceh Besar, maka keilmuan studi analisis kesetaraan gender menjadi acuan dalam melihat kasus ini. mengacu lahirnya keterwakilan juga keterlibatan perempuan sebagai pimpinan baik sebagai pimpinan perangkat gampong, pesantren dan tariqat disebabkan karena masyarakat sudah mempercayai kapabilitas mereka dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dan ini secara tersirat memperlihatkan bahwasanya perempuan dilingkungan tersebut sudah tidak terlalu dipandang sebagai hamba minor

---

<sup>27</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016) 257.

<sup>28</sup> Qismullah Yusuf, *21 Wanita Perkasa yang Ditempa Oleh Budaya Aceh*, (Jakarta: Alfabeta, 2021) 155.

diikuti dengan terkikisnya ajaran-ajaran patriarki yang menganggap perempuan tidak layak dilibatkan dalam struktur organisasi publik. Hal ini tentu didasari oleh cakrawala modernisasi yang mendatangkan arus perubahan bagi masyarakat di wilayah tersebut, perubahan sosial yang memperlihatkan perubahan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang sebelumnya sebagai basis daerah menganut nilai-nilai patriarki kemudian semenjak wilayah tersebut muncul pemimpin perempuan bergeser menjadi daerah yang ramah gender.

Dalam kajian Silvy Walbi, disebutkan bahwa dalam perkembangannya budaya patriarki terdiri dari dua kategori, pertama *private patriarchy* yaitu patriarki domestik dimana perempuan hanya berperan dalam aktifitas rumah tangga, kedua *public patriarchy* yakni patriarki publik yang menganggap perempuan tidak mampu berperan di ranah publik apalagi untuk memimpin.<sup>29</sup> Budaya patriarki mewarnai berbagai peradaban-peradaban besar sejarah dunia menjadikan perempuan sebagai makhluk *second class*, domestikasi tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat dari dulu hingga sekarang dengan berbagai sisi kelemahannya. Sejarah kelam mencatat bahwa perempuan merupakan objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan laki-laki baik sebagai barang, alat perbudakan, lambang kerendahan jauh dari kebebasan dan kemerdekaan.<sup>30</sup>

Islam datang mengangkat derajat wanita dan menyeterakan kedudukan laki-laki dan perempuan lewat ajaran-ajaran yang memuliakan dan menetapkan hak kaum perempuan sebagaimana laki-laki. Walaupun dalam perjalanannya semenjak Rasulullah sudah menyeterakan keduanya yaitu sama-sama sebagai hamba Allah tetap saja kelanggengan dominasi laki-laki dalam segala hal masih berlangsung lestari, karena sepeninggal Rasulullah penyetaraan tersebut memudar, perlahan-lahan budaya patriarki bangkit dan kembali berkembang, hal ini disebabkan konsep penafsiran teks keislaman dimana mayoritas tafsir hukum menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Penafsiran masa lalu menyebutkan seorang pemimpin diisi oleh laki-laki yang superior, ruang-ruang kesakralan publik tersebut diperuntukkan bagi mereka. Stigmatisasi perempuan sebagai makhluk domestik menjadi point besar untuk mendiskualifikasi perempuan dari kancah

---

<sup>29</sup> Silvy Walbi, *Theoryzing Patriarchy*, (Oxford England: Black Wellhim, 1998) 20.

<sup>30</sup> Ali Alawi Muhammad, *Uluwul Himmah 'Aindan Nisa, terjemahan Hadi Muhammad*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 23.

publik baik dengan memunculkan kelemahan dan ketidakberdayaannya. Seperti perempuan dianggap makhluk lemah, tidak memiliki intelektual, perempuan dianggap sebagai sumber fitnah hingga mendiskriminasikannya.<sup>31</sup>

Namun secara empirik kondisi perempuan sekarang sudah mampu memberdayakan dirinya bahkan orang banyak, hal ini terlihat dari peran-peran yang dijalankan oleh masing-masing di berbagai bidang kegiatan. Intelektualitas dan kapabilitasnya didukung lagi dengan modal sosial menjadikannya sebagai pimpinan sehingga mengubah image perempuan tadinya identik sebagai makhluk domestik berubah statusnya menjadi penghuni public.<sup>32</sup> Perempuan era sekarang telah menoreh berbagai prestasi publik baik berupa karya-karya maupun kontribusi nyata di zona laki-laki. Data menunjukkan kemampuan perempuan sebagai pemegang jabatan pemimpin semakin meningkat dari masa ke masa. Terhitung mulai tahun 2010 sampai 2020 40 % perempuan tercatat sebagai *talent pool*, baik sebagai pimpinan manajerial maupun posisi strategis lainnya di berbagai struktural pemerintahan maupun swasta.<sup>33</sup>

Kiprah kaum perempuan didunia publik tidak lagi menjadi pandangan yang langka, para kaum yang memiliki sifat feminim ini telah mendapatkan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa diberbagai lini kehidupan.<sup>34</sup> Profesionalismenya dalam menduduki jabatan-jabatan strategis diberbagai sektor telah menghiasi berbagai instansi atau lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta. Diantaranya isu yang dianggap penting dan menyita perhatian masyarakat dalam konteks kontestasi penetapan pemimpin adalah lahirnya pemimpin perempuan. Semakin kesini pimpinan perempuan semakin diminati dan layak untuk diangkat sebagai pimpinan baik di organisasi, lembaga maupun jabatan level strategis lainnya. Walaupun realitasnya sudah banyak perempuan yang mengisi pos-pos jabatan publik tapi tetap saja kontroversi kehadiran mereka menjadi polimik yang menarik diikuti bahkan terus dipersoalkan.

Husein Muhammad dalam bukunya menyebutkan realitas keberadaan perempuan saat ini secara tidak langsung sudah membantah sakralitas penafsiran klasik, dimana

---

<sup>31</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2019) 56.

<sup>32</sup> Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013) 367.

<sup>33</sup> Permen PPPA No 7 Tahun 2020 tentang peraturan Menteri PPPA No.3 tahun 2020

<sup>34</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...* 157.

kenyataannya perempuan memiliki kemampuan dalam memimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan tidak selamanya identik dengan sikap emosional karena dia juga bisa berfikir secara rasional dan ideal. Esensi dari sebuah kepemimpinan yaitu kapabilitas dan intelektualitas, dan dua hal ini bisa dimiliki oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.<sup>35</sup>

Rochel Shape menyebutkan dalam penelitiannya sebelum era digital native sekarang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki kelebihan dalam hal efektifitas pengelolaan tanggungjawabnya seperti memiliki daya memotivasi, lebih komunikatif yaitu memiliki daya komunikasi yang baik, mampu mengkondisikan tempat kerja secara positif, baik dan tenang, mampu berfikir secara mendalam dan punya perhatian lebih dalam memahami kondisi bawahannya, berpartisipasi aktif dalam menganalisis isu-isu aktual.<sup>36</sup>

Singkatnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan kapabilitas dan intelektualitas tersebut. Pandangan yang mensyaratkan hanya laki-laki yang boleh memimpin adalah pandangan klasik yang tidak sesuai dengan konteks era kekinian. Pergeseran sosial kemasyarakatan yang berlangsung di era abad modern ini mengantarkan perempuan berbondong-bondong mengisi ruang publik baik sebagai pemimpin, pendidik, agamawan, pengusaha, politikus, teknokrat, dan lain-lainnya. Di antara faktor yang melatarbelakangi lahirnya pimpinan perempuan tersebut diantaranya kemajuan zaman yang diikuti dengan undang-undang yang berpihak kepada perempuan, memudahkan mereka mendapatkan akses pendidikan, ekonomi, dan juga politik. Selain itu pesatnya perkembangan emansipasi perempuan yang menyamai kapabilitas perempuan setara dengan kapabilitas laki-laki menyebabkan turunnya keyakinan kepada pemimpin laki-laki dan menuntut perempuan menjadi pemimpin.<sup>37</sup>

### ***Faktor Munculnya Pemimpin Perempuan di Kabupaten Aceh Besar***

---

<sup>35</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai terhadap Wacana Agama dan Gender*, (Bantul: Lkis Yogyakarta, 2012), 64.

<sup>36</sup> Rocheel Shape, dalam jurnal Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan" (*Jurnal TAPIS, Edisi 11, 2015*)

<sup>37</sup> Rakhmawati, *Gender Relations In Islamic Fiqh: The Quest For Equality And Justice*. (*SHIBGLAH: Journal of Muslim Societies* 1.2 2020): 68-79.

Mendasari munculnya fenomena kepemimpinan perempuan, tercatat sebagai paradigma baru di Aceh Besar pada abad modern ini, hal ini tentu membawa atmosfer segar untuk kaum hawa. Dalam analisis penulis diperoleh beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi terpilihnya mereka sebagai *geuchik* (kepala desa) di *gampoeng* tersebut, seperti faktor yang berasal dari kepribadianya yang dijadikan sebagai faktor *internal*, kemudian juga terdapat faktor *eksternal* yang mendorong *geuchik* tersebut untuk diangkat menjadi pemimpin mereka.<sup>38</sup>

Fenomena lahirnya pemimpin perempuan di wilayah patriarki tepatnya wilayah kabupaten Aceh Besar, menunjukkan bahwa kedudukan perempuan di Aceh Besar sudah mendapatkan porsi yang sama sebagaimana laki-laki. Dalam hal ini kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan sudah terealisasi diantaranya pengangkatan perempuan ditempat-tempat yang dinilai sakral seperti *geuchik* (kepala desa), pimpinan pesantren, dan pimpinan tariqat. maka ini menandakan budaya patriarki yang begitu mendominasi di wilayah Aceh Besar sudah mulai melentur seiring hadirnya pimpinan-pimpinan publik perempuan ditempat tersebut. Keberadaan *geuchik* (pimpinan desa) dan pimpinan pesantren ini menandakan telah berkibarnya nilai-nilai egaliter dalam kehidupan masyarakat, dimana hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan pimpinan perempuan ditempat-tempat sakral, sebelumnya hanya laki-laki yang bisa menduduki jabatan itu, sedangkan perempuan dilarang bahkan haram menempatinnya. Ini semua juga tidak terlepas dari faktor realitas zaman terus berubah, keadaan menuntut kaum perempuan untuk berkiprah di wilayah publik, sama halnya seperti yang dilakukan laki-laki, di era modern pendidikan sudah disetarakan, akses dunia kerja sudah dijangkau oleh perempuan, berbagai kesempatan yang seharusnya diperuntukkan untuk laki-laki, tapi perempuan terlibat di dalamnya, oleh karenanya dengan fenomena keterlibatan perempuan di dunia public ini dengan serta merta mereka ikut memiliki *power*, *skill* dan kapabilitas yang sama dengan laki-laki.<sup>39</sup>

Berikut ini faktor munculnya pimpinan-pimpinan perempuan ini dan pola kepemimpinan yang dijalankan serta pengaruh yang didapati oleh masyarakat. Tahapan

---

<sup>38</sup> Mieke T. A. Lopes Cardozo et al., "Silent Struggles: Women Education Leaders' Agency for Peacebuilding in Islamic Schools in Post-Conflict Aceh," *Journal of Peace Education*, May 4, 2022, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17400201.2022.2052826>.

<sup>39</sup> Husin, "Leadership and Authority."



penelitian yang diperoleh melalui pengamatan, penelusuran dan ditambah lagi dengan diskursus pembelajaran feminis, dimana diskusi-diskusinya terus berkembang dengan berbagai dinamika persoalan yang terus bermunculan. Gejala sosial masyarakatnya maupun faktor pendukung bagian dari aspek yang menjadi faktor pendukung untuk keberlangsungan penelitian ini. Melalui penggalian informasi dalam bentuk wawancara dan mengobservasi kondisi sosiologis kemasyarakatan dan terkhusus lingkungan tempat pimpinan perempuan ini diangkat, sehingga dari sini akan diperoleh jawaban-jawaban secara spesifik dari hasil interview dan pengamatan lapangan secara langsung mulai dari faktor munculnya pemimpin gampong perempuan di wilayah Aceh Besar, model kepemimpinannya dan pengaruh dari kepemimpinannya.

Dalam analisis penulis dari hasil penelitian baik berupa observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka diperoleh beberapa factor pendukung yang mempengaruhi terpilihnya mereka sebagai *guchik* (kepala desa) di *gampong* tersebut. Pertama faktor internal yang bersumber dari kepribadiannya berupa karakteristik yang melekat pada dirinya, yaitu dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan akrab dengan masyarakat sekitar, khususnya bagi warga gampong tersebut yang senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil bagi mereka yang membutuhkan.<sup>40</sup>

Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Porter menyebutkan bahwa ada beberapa model kepemimpinan yang dimiliki oleh para pemimpin, pertama; keputusan yang diambil harus berorientasi pada otokratik dan demokratik, kedua; seorang pemimpin harus memiliki skill kepemimpinan, sehingga mampu mempengaruhi bawahannya, partner kerja dengan sejumlah strategi yang dimilikinya.<sup>41</sup> Dari sikap secara internalnya sudah bisa disimpulkan mereka memiliki power dalam mengelola diri dan orang lain. Hal yang disama juga ditemukan dalam penelitian Fitriani, pada dasarnya perempuan memiliki sifat-sifat dasar yang kemudian dipraktekkan dalam kepemimpinannya, seperti sikap sabar, memiliki empati dan *multitasking*<sup>42</sup>

Selanjutnya faktor eksternal. Selain dikenal dikenal sebagai sosok yang mudah

---

<sup>40</sup> Hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, terdiri dari warga dan perangkat gampong (aparatur desa) di tiga lokasi terpisah dalam wilayah kabupaten Aceh Besar yakni di desa Miuruk Taman kecamatan Darussalam dan desa Seunebok kecamatan Seliumum kabupaten Aceh Besar.

<sup>41</sup>Porter, Crampon dan Smith, *Organizational Commitment and Managerial Turn Over, Organizational Behavior and Human Perforanace*, 2004

<sup>42</sup> Fitriani, “*Gaya Kepemimpinan Perempuan*”, (Jurnal Tapis edisi 11, 2015) 10.



bergaul dan akrab dengan masyarakat, para *geuchik* ini juga memiliki kapabilitas skill kepemimpinan yang bagus, tidak hanya dari sisi moril saja, secara keilmuan mereka memiliki otoritas keilmuan dan skill kepemimpinan yang bagus juga, sehingga masyarakat yang pro terhadapnya terpanggil untuk memilihnya dengan memberikan suara pada saat pencoblosan. Selain kepribadiannya yang baik, mereka juga dikenal mandiri secara ekonomi, mudah dalam mengambil keputusan, sangat progresif serta memiliki sikap percaya diri. Rekam jejak para *geuchik* ini jauh sebelum mereka menjabat sebagai kepala desa, memang sudah dikenal dengan pengabdianya terhadap lingkungan desa mereka tinggal, aktif dalam setiap kegiatan gampong berupa kontribusi secara langsung dalam membangun kemajuan masyarakat di *gampoeng* tersebut.<sup>43</sup>

Munculnya *geuchik* atau kepala desa perempuan ini diantaranya di faktori oleh kemajuan zaman, dimana arus media informasi, yang mengantarkan kaum perempuan tadinya aktifitas mereka hanya sebatas di wilayah domestik, sebab kemajuan zaman dan teknologi mengantarkannya berkiprah di dunia publik, sehingga kaum perempuan memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas untuk memamfaatkan dan menyempurnakan akal fikirannya secara maksimal, kemudian diikuti dengan peraturan undang-undang yang pro terhadap perempuan, tentu sangat mempengaruhi kedudukan mereka dari keterkekangan terbuka peluang untuk mendapat kesetaraan selaku hamba Allah yang memakmurkan bumi ini. Kemudian lahirnya undang-undang membenarkan perempuan berperan secara publik dan melibatkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik, baik sebagai presiden, legislatif maupun eksekutif. Selanjutnya ada faktor munculnya para aliran/ jaringan feminis yang gencar memeperjuangkan hak-hak perempuan juga berdampak pada kondisi psikologis perempuan, dimana mindset kaum perempuan sebelumnya masih membatasi diri diruang publik karena dalam anggapannya kodrat mereka bertugas di wilayah domestik (*domestic sphere*) sedangkan wilayah publik (*public sphere*) adalah zonanya laki-laki, jadi semanjak gencarnya kampanye emansipasi perempuan, mampu mempengaruhi pola pikir bahwa kaum perempuan juga mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh laki-laki.

---

<sup>43</sup> Observasi dan wawancara dengan pihak terkait di tiga lokasi terpisah dalam wilayah Aceh Besar yakni di Desa Miuruk Taman Kecamatan Darussalam dan Desa Seunebok Kecamatan Seliumum Kabupaten Aceh Besar yang di lakukan pada bulan Oktober dan Desember 2023.

Dukungan masyarakat ini sangat mempengaruhi terciptanya *good government* dalam desa tersebut, sehingga perpaduan faktor internal dan eksternal ini mengantarkan mereka mengukir beberapa prestasi yang disabetnya. Sehingga sampailah pada satu rumusan bahwa para perempuan ini melalui semangat kepemimpinannya dengan segenap kemampuan dan kelayakan yang dimilikinya mampu memberdayakan masyarakat dan anggota-anggota dibawah secara baik, bertanggungjawab, progresif lewat keilmuan dan program-program andalan masing-masing.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Fitriani dalam penemuannya menyebutkan bahwa, perempuan yang menjadi pemimpin memiliki berapa ciri khas, yaitu pertama; memiliki sikap dalam membujuk sehingga lebih persuasif dalam segala hal, kedua; biasanya sosok pemimpin perempuan memiliki pengelolaan ego yang baik, bahkan egonya lebih rendah dari laki-laki, ketiga; kepemimpinan perempuan cenderung memiliki sikap kepedulian yang tinggi, komprehensif, diikuti dengan keinginan menyelesaikan setiap masalah dengan segera dan juga sesegera mungkin mengambil keputusan, keempat; siap mengambil resiko dalam keadaan bagaimanapun.<sup>44</sup> Maka stigmatisasi masyarakat yang kental nilai-nilai patriarki yang menganggap perempuan sebagai makhluk inferior tidak punya adidaya dalam mengelola kepemimpinan publik sudah terbantahkan melalui kegiatan, program unggulan yang dijalankan serta prestasi yang ditoreh oleh masing-masing pemimpin perempuan tersebut.

Namun faktor munculnya pemimpin perempuan ini sedikit berbeda dengan pimpinan pesantren dari kalangan kaum perempuan, misalnya Ummi Mukramati, beliau adalah anak dari seorang ulama kharismatik Aceh Besar yang bernama Tengku Muhammad Zamzami. Pesantren ini didirikan oleh suaminya Abu Mahdi, Ummi Mukramati diangkat sebagai pimpinan pesantren untuk menggantikan suaminya yang meninggal dunia karena sakit, maka sosoknya ditunjuk sebagai penerus estafet dalam mengelola pesantren tersebut dengan jumlah santri sekitar empat ratusan. Melalui pendidikan agama ini yang dikenal dengan sebutan *dayah*, dalam perjalanannya beliau mampu mengorbit dan mengembangkan pasantrennya lebih baik lagi, hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah santri yang mondok di lembaga dayah tersebut. Sosoknya mampu membuka paradigma baru masyarakat terhadap positifisme kepemimpinan perempuan

---

<sup>44</sup> Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan"... 12

dalam pendidikan dayah (pesantren salafiyah-tradisionalis), dimana sebelumnya lembaga dayah tradisional kerap dikenal dengan pen subordinasian perempuan karena modernisasi dayah belum sepenuhnya dilakukan.

Faktor yang sama sama juga melekat pada sosok kepemimpinan perempuan kharismatik yang bernama Tengku Lailan, kesungguhannya dalam menuntut ilmu ke salah satu pesantren ternama di Aceh yaitu dayah Darussalam Labuhan Haji mengantarkannya menjadi pribadi yang berilmu, sederhana dan sosoknya yang zuhud menjadikan beliau sebagai pemimpin Thariqat sekaligus pesantren yang di Kelola olehnya. Dalam kegiatan harian biasanya beliau terjun langsung untuk mengajari mereka yang butuh bimbingan dan haus akan keilmuan. Materi pengajian yang diajarkannya meliputi fiqh, aqidah, tasawuf serta ilmu al Quran.<sup>45</sup>

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil menjelaskan hubungan yang proporsional antara agama Islam dan budaya Jawa melalui analisis tradisi persembahan Rewanda di Semarang. Dengan menggunakan teori sakral dan profan Emile Durkheim sebagai landasan analisis, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan unsur-unsur tradisi Rewanda menjadi dua kategori utama: sakral dan profan. Pada bagian pertama, penelitian mengungkap unsur-unsur sakral dalam tradisi persembahan Rewanda yang meliputi ritual-ritual keagamaan, pemujaan kepada leluhur, dan simbolisme spiritual yang memperkuat nilai-nilai keagamaan Islam dalam konteks budaya Jawa. Elemen-elemen ini menunjukkan bagaimana tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemujaan, tetapi juga sebagai medium untuk memperkuat ikatan spiritual dan sosial dalam komunitas. Bagian kedua mengklasifikasikan unsur-unsur profan dalam tradisi tersebut, yang mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial yang terkait dengan pelaksanaan tradisi. Unsur-unsur profan ini mencerminkan adaptasi budaya dan interaksi sosial yang mengiringi pelaksanaan ritual, menunjukkan bagaimana tradisi ini berintegrasi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Semarang.

---

<sup>45</sup> Hasil Observasi dan wawancara dengan pihak terkait di dua lokasi terpisah dalam wilayah Aceh Besar yakni pesantren dayah Istiqamatuddin desa Mata Ie kecamatan Montasik dan pesantren Dayah Thaliban Ateuk Lung Ie kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, yang di lakukan pada bulan Oktober dan Desember 2023.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tradisi Rewanda menggabungkan elemen-elemen sakral dan profan, serta menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai jembatan antara agama dan budaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang hubungan antara agama dan budaya, tetapi juga memberikan wawasan penting tentang dinamika tradisi lokal dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat modern.

## REFERENSI

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah Tafsir Progressif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCISOD, 2019.
- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istishlahiyah Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Agus Budi Wibowo. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh Besar*. Badan Perpustakaan Propinsi Nanggro Aceh Darussalam, 2006
- Alfitri, Alfitri. "Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia." *Studia Islamika* 27, no. 2 (August 3, 2020): 273–307. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>.
- Amiruddin, Hasbi. *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Jakarta: Nadia Fondation, 2013.
- Anam, Wahidul, and Mubaidi Sulaeman. "Reinterpretasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al-Shariah." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (December 28, 2022). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172>.
- Asri, Yasnur, and Ermawati Arief. "Contesting the Patriarchal Authority: Portrait of Millennial Women in the Indonesian Novel," 191–202. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201109.032>.
- BBC News Indonesia. "Pilkada 2024: Perempuan dibidang 'haram' jadi pemimpin Aceh, syariat atau politik praktis?," November 15, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ml75j109jo>.
- Burgess, Robert G. *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*. Routledge, 2003.
- Cardozo, Mieke T. A. Lopes, Rizki Amalia Affiat, Faryaal Zaman, Maida Irawani, and Eka Srimulyani. "Silent Struggles: Women Education Leaders' Agency for Peacebuilding in Islamic Schools in Post-Conflict Aceh." *Journal of Peace Education*, May 4, 2022. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17400201.2022.2052826>.
- Creswell, John W., William E. Hanson, Vicki L. Clark Plano, and Alejandro Morales. "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation." *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 1, 2007): 236–64. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Firda Yana Z, Zara. “Fenomena Penerimaan masyarakat Terhadap Geuchik Perempuan, Studi Terhadap Geuchik Bunda Cut di Desa Seunebok Kecamatan Seulimum” *Repository.ar-raniry.ac.id*, 2021
- Fitriani. “Gaya Kepemimpinan Perempuan”. *Jurnal Tapis* edisi 11, 2015
- Helen Tierney (Ed). “Women’s Studies Encyclopedia”. New York: Green Wood Press
- Heriyanto, Heriyanto. “Patriarchal Culture, Theology and State Hegemony in Issues of Gender Equality in Indonesian Politics,” 11–15. Atlantis Press, 2023. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0\\_3](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-150-0_3).
- Hilmiati, Hilmiati, Ernita Dewi, and Zuherni Zuherni. “Persepsi Masyarakat atas Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar.” *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (June 30, 2022): 117–35. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13140>.
- Husin, Asna. “Leadership and Authority: Women Leading Dayah in Aceh.” In *Gender and Power in Indonesian Islam*. Routledge, 2013.
- Kamaliyah, Munawiyah. “Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampoeng dan Kesejahteraan masyarakat di Mereudu Aceh. *Jurnal Gender Equality*” 2017.
- Karistie, Janine Febe, Fega Ayu Pangestika, Ainur Ridho, and Mizan Bustanul Fuady Bisri. “Women Participation in Disaster Risk Management Practices in Indonesia: A Systematic Review.” In *Inclusive and Integrated Disaster Risk Reduction*, edited by Aaron Opdyke and Liberty Pascua de Rivera, 207–33. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-81072-5\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-031-81072-5_15).
- Kiram, Muhammad Zawil. “Gender and Family in Modern Acehese Society.” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 14, no. 1 (June 30, 2020): 126–46. <https://doi.org/10.24815/jsu.v14i1.16794>.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007
- Kormos, Rebecca. *Intertwined: Women, Nature, and Climate Justice*. 1st ed. La Vergne: New Press, The, 2024.
- Liow, Joseph Chinyong. “Islamist Ambitions, Political Change, and the Price of Power: Recent Success and Challenges for the Pan-Malaysian Islamic Party, PAS.” *Journal of Islamic Studies* 22, no. 3 (September 1, 2011): 374–403. <https://doi.org/10.1093/jis/etr030>.
- Mcclelland, David c. *The Achieving Society*. New York: D.Van Nostrad, 1961.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Muhammad, Ali Alawi. *Uluwul Himmah ‘Aindan Nisa. terjemahan Hadi Mubammad*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muhammad. Husen, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai terhadap wacana Agama dan Gender*. Bantul: Lkis Yogyakarta, 2012.
- Munawiah, Munawiah, and Ernita Dewi. “Existency of Women Leadership at Village Level and Its Orientation against Gender Justice (Case Studies in Banda Aceh and Aceh Besar).” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 2 (May 5, 2021): 2298–2305. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1926>.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta : Kibar Press, 2007.
- Oktavia, Tri Winda, Firyal Iftikhar Cikalkinanty, and Agus Fakhruddin. “Patriarchy Culture in Gender Equality Concept: Islamic Perspective.” *Al-Mada: Jurnal*

- Agama, Sosial, Dan Budaya* 5, no. 1 (February 23, 2022): 81–93. <https://doi.org/10.31538/almada.v5i1.2010>.
- Permen PPPA No 7 Tahun 2020 tentang peraturan Menteri PPPA No.3 tahun 2020
- Porter, Crampon dan Smith. “Organizational Commitment and Managerial Turn Over, Organizational Behavior and Human Perfomanace”. 2004,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Rakhmawati. Gender Relations In Islamic Fiqh: The Quest For Equality And Justice. SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies 1, no. 2, 2020.
- Riyani, Irma. *Islam, Women’s Sexuality and Patriarchy in Indonesia: Silent Desire*. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003042723>.
- Rocheel Shape, Fitriani. “Gaya Kepemimpinan Perempuan” (Jurnal TAPIS, Edisi 11, 2015).
- Rofi’ah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 202.
- Rusdi Sufi, dkk, *Aceh Besar, Sejarah, Adat dan Budaya*, (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, 2019).
- Sanjaya, Ade. *Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Shihab, Quraish. *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut’ah sampai nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sudarso, Sudarso, Phillipus Edy Keban, and Siti Mas’udah. “Gender, Religion and Patriarchy: The Educational Discrimination of Coastal Madurese Women, East Java.” *Journal of International Women’s Studies* 20, no. 9 (December 20, 2019): 2–12.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Quran*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2002.
- Walbi, Silvy. *Theoryzing Patriarchy*, (Oxford England: Black Wellhim, 1998).
- Yusuf, Qismullah. *21 Wanita Perkasa yang Ditempa Oleh Budaya Aceh*. (Jakarta: Alvabet, 2021).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).